

URGENSI HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH

**Oleh
Heryandi**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRACT

The management of off shore gas and oil mining in regional autonomy era is related to three categories of law regulations, namely the categories of regulations on mining, marine area and regional autonomy. Each regulation can reach its goals if one another works harmoniously, however, in reality these three categories of regulations are disharmonious, either in the principles of the objectives, institution authority, or law implementation area. Therefore, this paper will explain the importance of harmonization and the substance of regulations needed to harmonize.

Keywords: Harmonization, gas and oil mining, off shore and regional autonomy.

I. PENDAHULUAN

Pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah lepas pantai dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat. Saat ini tidak kurang dari 6.000 instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai yang ada di seluruh dunia. Adanya kenyataan ini, berbagai negara dan organisasi internasional pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian kepada masalah teknik maupun hukum, khususnya dibidang instalasi dan bangunan untuk eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah lepas pantai, terlebih lagi berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) laut (Seputar Indonesia, 2008: 5).

Produksi minyak bumi Indonesia sampai tahun 2005 tercatat 990.000 barel/hari, termasuk yang berada di lepas pantai. Dari tahun ke tahun produksi migas Indonesia mengalami penurunan. Tahun 2008 produksi minyak dan gas bumi Indonesia hanya mencapai 927.000 barel/hari (Gatra, 2007). Sementara itu, dikaji dari aspek hukum pengelolaan pertambangan migas lepas pantai, terkait dengan banyak peraturan perundang-